

## ANALISIS LAJU PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2015-2017

Oleh:

**Rafly Parenta Bano**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke

E-mail: rbano@bps.go.id

### **Abstrac**

*Until 2017, Papua was the only province in Indonesia where human development was classified as low at 59.09. However, the speed of human development in the last three years is the highest in Indonesia. The purpose of this study is to determine the speed of human development in Papua during 2015-2017 and comparison with other provinces in Indonesia and predict how many years it will take so that human development in Papua can be equal to that of other provinces. Although this study only uses a very simple descriptive analysis method, but by applying the velocity formula of two moving objects it can produce important information to develop strategies to boost human development in Papua. As a result, President Jokowi's development policy in Papua made the speed of human development in Papua Province ranked first (top movers) during 2015-2017 with its average annual speed is 1.36 percent per year. This achievement is higher than the achievements of West Papua and Maluku Provinces. It means that assuming a human development situation such as this period, within the next 15 years, human development achievements in the Papua Province will be able to outperform human development in West Papua and Maluku Provinces.*

**Keyword: Papua Province; Development Planning; Development Policy; Human Development Index**

### **PENDAHULUAN**

Salah satu sasaran pokok pembangunan nasional adalah pembangunan manusia dan masyarakat. Secara eksplisit, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Buku I, pemerintah menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama periode 2014-2019. Selain itu, beberapa indikator yang terkait dengan IPM juga ditargetkan meningkat, seperti rata-rata lama sekolah, rasio angka partisipasi kasar antara 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya, serta penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Selain tercantum dalam sasaran pembangunan manusia dan masyarakat, IPM juga menjadi target dalam sasaran pembangunan wilayah dan antarwilayah. Pemerintah menargetkan pembangunan daerah tertinggal semakin maju yang ditandai dengan peningkatan IPM daerah tertinggal. Dalam RPJMN Buku II, pulau besar di Indonesia dengan IPM yang rendah mendapat prioritas khusus untuk meningkatkan capaian pembangunan manusia. Hal ini ditujukan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan manusia antarwilayah dan pemerataan pembangunan dapat terwujud.

Dengan mengacu pada sasaran pembangunan manusia yang akan dicapai, pemerintah menetapkan arah kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah

3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

Untuk melihat kemajuan pembangunan, khususnya pembangunan manusia di suatu wilayah, salah satu indikator yang digunakan adalah kecepatan pertumbuhan IPM (BPS, 2018). Selain sebagai evaluator dari implementasi program pembangunan manusia di suatu wilayah, juga berfungsi sebagai instrumen dasar untuk memprediksi jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan manusia dari wilayah lainnya yang lebih maju.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi yang diterbitkan tahun 2018 berjudul “Indeks Pembangunan Manusia 2017” menyebutkan bahwa pada beberapa kasus wilayah yang memiliki IPM rendah justru menunjukkan tren pertumbuhan IPM yang cukup cepat (top mover). Faktanya, sembilan dari sepuluh besar kabupaten/kota yang pertumbuhan IPM tertinggi se-Indonesia adalah kabupaten/kota yang capaiannya IPMnya sangat rendah. Sembilan kabupaten tersebut antara lain: Kabupaten Nduga, Pegunungan Bintang, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Yalimo, Puncak, Mamberamo Raya, Asmat dan Puncak Jaya. Uniknya, Sembilan kabupaten tersebut tidak berada di Pulau Jawa, melainkan Provinsi Papua. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak menutup kemungkinan konvergensi wilayah dapat terwujud dengan adanya perbaikan pembangunan manusia di Indonesia Timur yang dapat mengejar ketertinggalannya.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui rata-rata laju pertumbuhan IPM di Papua periode 2015-2017. Kemudian dilakukan perbandingan dengan provinsi lain di Indonesia untuk mengukur seberapa cepat capaian pelaksanaan pembangunan manusia di Provinsi Papua serta memprediksi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan dari provinsi lainnya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikator IPM mana yang cenderung mempengaruhi fluktuasi pertumbuhan IPM setiap tahunnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari situs resmi Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) dan BPS Provinsi Papua ([www.papua.bps.go.id](http://www.papua.bps.go.id)). Data yang dimaksud yaitu: data IPM Menurut Provinsi tahun 2010-2017 dan data IPM Provinsi Papua tahun 2010-2017.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif sederhana. Menurut Ghozali (2005) analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi atas suatu data. Data disajikan dalam bentuk tabel (satu arah atau dua arah) dan grafik. Dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan minimum. Standar deviasi, maksimum dan minimum menunjukkan hasil analisis terhadap *disperse* (penyebaran) data. Standar deviasi juga menunjukkan penyimpangan data terhadap nilai rata-rata.

Dalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan capaian IPM Provinsi Papua, membandingkan IPM Provinsi Papua dengan provinsi dengan capaian IPM tertinggi, membandingkan dengan provinsi di wilayah timur

Indonesia, menguraikan pertumbuhan dan laju pertumbuhan IPM Provinsi Papua serta membandingkan pertumbuhan dan laju pertumbuhan IPM Provinsi Papua dengan provinsi lainnya.

Pertumbuhan IPM di suatu wilayah dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \left( \frac{\text{IPM}_t - \text{IPM}_{t-1}}{\text{IPM}_{t-1}} \right) \times 100\% \quad (1)$$

Kecepatan pertumbuhan IPM dihitung sebagai rata-rata pertumbuhan IPM selama periode tertentu. Sedangkan waktu yang dibutuhkan oleh wilayah X agar capaian IPMnya mampu menyusul IPM wilayah Y dihitung dengan rumus:

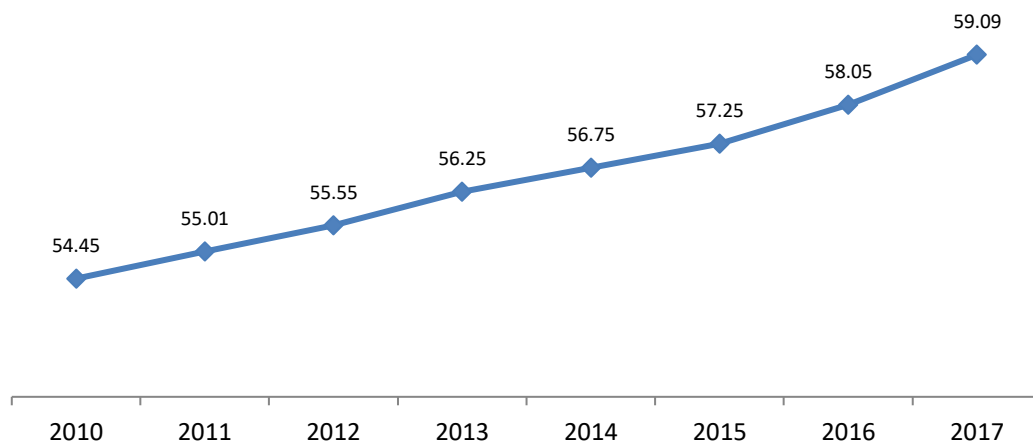
$$t = \left( \frac{\text{IPM}_X - \text{IPM}_Y}{\text{Kecepatan}_Y - \text{Kecepatan}_X} \right) \quad (2)$$

Selain itu, analisis deskriptif juga digunakan untuk menjabarkan capaian setiap indikator komponen penyusun IPM Provinsi Papua selama tujuh tahun terakhir. Tujuannya untuk mengetahui indikator manakah yang cenderung searah terhadap laju pertumbuhan IPM Provinsi Papua.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Laju IPM Provinsi Papua Tahun 2015-2017

BPS mencatat bahwa pada tahun 2017, posisi IPM Provinsi Papua menempati urutan paling bawah dari 34 provinsi di Indonesia. Bahkan sampai tahun 2017, Provinsi Papua adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang capaian IPMnya masih berstatus rendah yakni sebesar 59,09. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian IPM Provinsi Papua terus meningkat. Pada tahun 2016 capaiannya sebesar 58,05. Sementara pada tahun 2015 capaiannya sebesar 57,25. Perkembangan capaian IPM Provinsi Papua seperti ditampilkan dalam Gambar 1.

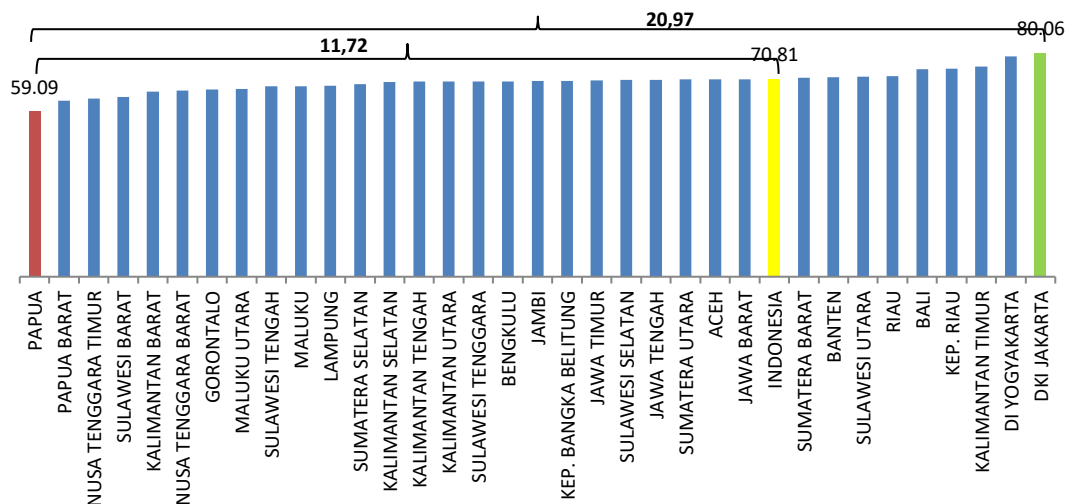


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018 (diolah)

**Gambar 1**  
**Perkembangan IPM Provinsi Papua Tahun 2010-2017**

Bila dibandingkan dengan capaian provinsi lainnya di Indonesia, capaian IPM Provinsi Papua sangat jauh tertinggal. Capaiannya paling terendah se-

Indonesia. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2 di bawah. Misalnya saja dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta. Tahun 2017 IPM Provinsi DKI Jakarta sebesar 80,06. Ada selisih sangat besar IPM Provinsi Papua dengan IPM Provinsi DKI Jakarta sebesar 20,97.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (diolah)

**Gambar 2.**

### **Perkembangan IPM Provinsi Papua Tahun 2010-2017**

Bila dibandingkan dengan provinsi di wilayah timur Indonesia, IPM Provinsi Papua juga pun sama. Masih jauh lebih rendah. Misalnya bila dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Tahun 2017, IPM ketiga provinsi tersebut masing-masing sebesar 62,99, 68,19, dan 67,20. Hal itu berarti pembangunan manusia di ketiga provinsi tersebut sudah berstatus sedang. Bahkan sejak tahun 2012. Terlebih lagi, Provinsi Maluku dan Maluku Utara sudah berstatus sedang sebelum tahun 2010.

Secara nasional, capaian IPM Indonesia tahun 2017 sebesar 70,81. Bila dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Papua (59,09) terdapat selisih sebesar 11,72. Selisih besar tersebut mengindikasikan suatu hal, yaitu pembangunan manusia di Papua sangat jauh tertinggal. Sehingga diperlukan aksi percepatan pembangunan manusia di Papua agar dapat mengejar ketertinggalan dari provinsi lainnya di Indonesia.

Akan tetapi, meskipun capaian IPM Provinsi Papua adalah yang terendah, kecepatan pembangunan manusia di Provinsi Papua justru yang paling tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Bahkan, tertinggi dalam kurun dua tahun terakhir (2015-2017). Hal tersebut nampak dari tingginya laju pertumbuhan IPM Provinsi Papua.

Pada tahun 2017 IPM Provinsi Papua bertumbuh sebesar 1,79 persen. Angka tersebut meningkat dari capaian tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 pun sama halnya. Meningkat 1,40 persen dari tahun sebelumnya. Capaian tersebut bahkan lebih tinggi dari capaian Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Barat yang menempati peringkat kedua dan ketiga. Tahun 2017 IPM Nusa Tenggara Barat bertumbuh sebesar 1,17 persen dan tahun 2016 bertumbuh sebesar 0,95 persen.

Sementara IPM Provinsi Sulawesi Barat bertumbuh sebesar 1,10 persen di tahun 2017 dan 1,02 persen di tahun 2016.

Bila melihat akselerasinya, pembangunan manusia di Provinsi Papua tergolong cepat. Mampu berakselerasi dalam tiga tahun terakhir. Akselerasinya pun adalah yang tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dari ukuran rata-rata pertumbuhan IPM dalam kurun tiga tahun terakhir.

Tabel 1 menunjukkan rata-rata pertumbuhan IPM Provinsi Papua periode 2015-2017 sebesar 1,36 persen per tahun. Bandingkan dengan provinsi lainnya, capaian tersebut jauh mengungguli akselerasi IPM Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Timur. Padahal kedua provinsi tersebut mempunyai catatan capaian IPM yang berstatus tinggi. Rata-rata pertumbuhan IPM di kedua provinsi tersebut pada periode 2015-2017 masing-masing sebesar 0,47 persen per tahun dan 0,58 persen per tahun.

Catatan rata-rata pertumbuhan IPM Provinsi Papua juga lebih tinggi dari capaian Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Barat. Kedua provinsi tersebut berhasil mengakselerasi pembangunan manusianya dengan menempati urutan kedua dan ketiga tertinggi. Rata-rata pertumbuhan IPM di kedua provinsi tersebut pada periode 2015-2017 masing-masing sebesar 1,16 persen per tahun dan 1,09 persen per tahun. Fenomena ini menjelaskan bahwa semakin tinggi capaian pembangunan manusia di suatu wilayah maka kecepatan pembangunan manusianya cenderung melambat. Demikian pula sebaliknya. (BPS, 2018)

**Tabel 1.**  
**Capaian dan Peringkat Pertumbuhan IPM Menurut Provinsi di Indonesia**  
**Tahun 2015-2017**

Provinsi	Capaian IPM 2017	Kategori IPM	Pertumbuhan IPM/peringkat			
			2015	2016	2017	rata-rata 2015-2017
Tiga Teratas						
Papua	59,09	Rendah	0,88/21	1,40/1	1,79/1	1,36/1
Nusa Tenggara Barat	66,58	Sedang	1,37/1	0,95/14	1,17/3	1,16/2
Sulawesi Barat	64,30	Sedang	1,16/3	1,02/11	1,10/4	1,09/3
Tiga Terbawah						
Kepulauan Riau	74,45	Tinggi	0,48/31	0,33/34	0,62/31	0,47/34
Kalimantan Utara	69,84	Sedang	0,17/34	0,64/29	0,92/9	0,58/33
Kalimantan Timur	75,12	Tinggi	0,47/32	0,57/30	0,71/27	0,58/32

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (diolah)

Akselerasi pembangunan manusia yang tinggi menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir pembangunan manusia di Provinsi Papua mulai dipercepat untuk mengejar ketertinggalan dari provinsi lainnya. Khususnya pembangunan manusia dalam meningkatkan tingkat kesehatan, pendidikan dan pendapatan penduduk. Menariknya, akselerasi tersebut terjadi pasca pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjabat sebagai Presiden dan Waki Presiden Republik Indonesia.

Data tersebut juga mencerminkan pembuktian komitmen keduanya membangun manusia dari pinggiran dan pembangunan di kawasan Timur Indonesia yang tertuang jelas dalam Visi-Misi Nawacita, yakni komitmen untuk “melakukan pemerataan pembangunan antar wilayah: antara Jawa dengan luar Jawa, antara wilayah Indonesia Barat dengan wilayah Timur Indonesia, antara Kota dengan Desa” dan “membangun dari pinggiran” serta “meningkatkan pembangunan berbagai fasilitas produksi, pendidikan, kesehatan, pasar tradisional dan lain-lain di pedesaan, daerah terpencil dan tertinggal.”

Melihat data rata-rata pertumbuhan IPM dalam kurun tiga tahun terakhir tersebut maka dapat diprediksi bahwa dalam kurun beberapa tahun mendatang pembangunan manusia di Provinsi Papua akan mampu menyamai capaian IPM dari provinsi lainnya. Prediksi tersebut didasari atas prinsip rumus kecepatan dua benda bergerak saling susul namun dengan asumsi situasi pembangunan manusia yang sama selama tiga tahun terakhir.

Hasil kalkulasi (Tabel 2) menunjukkan bahwa hanya dalam waktu 15 tahun ke depan, IPM Provinsi Papua mampu menyamai capaian IPM lima provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Maluku. Sementara 5 tahun setelahnya mampu sejajar dengan capaian IPM tujuh provinsi, yaitu: Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Riau, Banten, Sulawesi Barat dan Lampung.

**Tabel 2.**  
**Perkiraan Waktu yang Dibutuhkan Provinsi Papua Mengejar Capaian IPM Provinsi Lainnya di Indonesia**

Provinsi	IPM 2017	Waktu yang Dibutuhkan (Tahun)
<b>PAPUA</b>	<b>80.06</b>	<b>0</b>
NUSA TENGGARA TIMUR	70.52	8
PAPUA BARAT	74.3	9
KALIMANTAN BARAT	75.12	11
KALIMANTAN UTARA	69.95	14
MALUKU	68.86	14
KEP. RIAU	67.01	17
SULAWESI TENGAH	66.58	17
GORONTALO	71.24	18
RIAU	69.84	19
BANTEN	70.57	19
SULAWESI BARAT	69.79	19
LAMPUNG	68.11	20

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (diolah)

## 2. Capaian Indikator IPM Provinsi Papua Tahun 2011-2017

Gambar 3 menunjukkan bahwa pertumbuhan IPM Provinsi Papua periode 2015-2017 disebabkan karena indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan pengeluaran per kapita (PPK) yang tumbuh sangat signifikan. Tahun 2017, PPK tumbuh sebesar 5,41 persen dan HLS tumbuh sebesar 3,03 persen. Sementara

pertumbuhan indikator AHH dan RLS justru menurun menjadi 1,95 persen dan 0,03 persen.

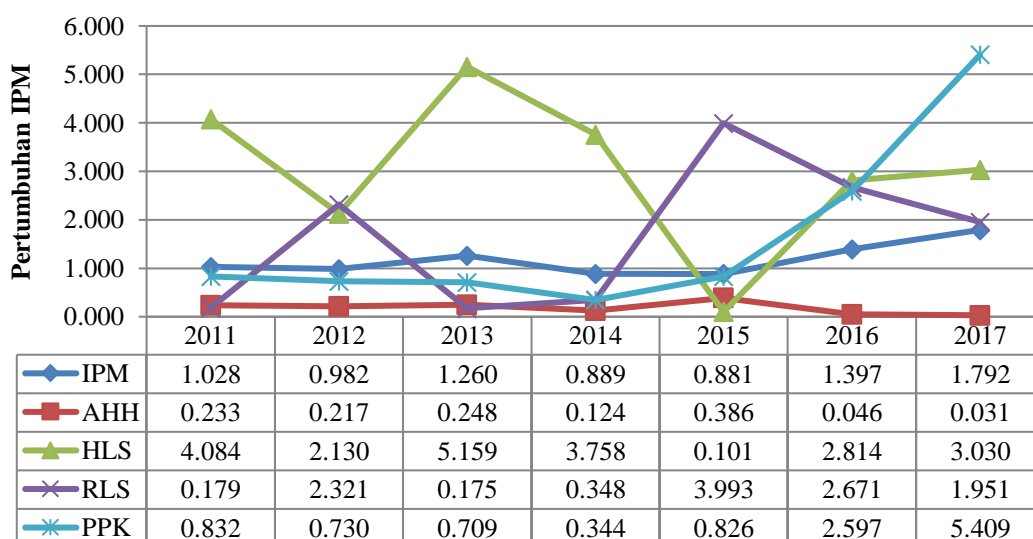
Gambar 3 juga menunjukkan bahwa fluktuasi pertumbuhan IPM Provinsi Papua mengikuti fluktuasi pertumbuhan indikator PPK dan HLS. Misalnya pada tahun 2015, pertumbuhan IPM menurun ke level 0,881 persen dimana sebelumnya pada tahun 2014 pertumbuhannya sebesar 0,889 persen. Tren tersebut searah dengan pertumbuhan indikator PPK yang melambat di tahun 2015 dan pertumbuhan indikator HLS yang menurun tajam. Hubungan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Astuti tahun 2018 yang mengatakan bahwa lamanya seseorang mendapatkan pendidikan maka tingkat pendapatan akan meningkat yang berimplikasi langsung pada meningkatnya IPM.

Setelah tahun 2015 pembangunan manusia di bidang pendidikan dan peningkatan tingkat pendapatan mengalami akselerasi. Akselerasi HLS yang tinggi terjadi karena pemerintah pusat dan daerah berhasil meningkatkan tingkat partisipasi sekolah dan menurunkan angka putus sekolah yang signifikan melalui mekanisme jaminan pendidikan bagi anak usia sekolah yakni program Indonesia pintar (PIP) dan bantuan siswa miskin (BSM).

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Astri, dkk (2013), Putra S, dkk (2017) serta Pramono dan Soesilowati (2016) yang mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah pusat dan daerah yang tinggi pada sektor pendidikan secara signifikan mempengaruhi peningkatan IPM. Hasil penelitian Baeti (2013) juga menunjukkan hal yang sama yakni apabila peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka akan meningkatkan IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,60.

Sementara akselerasi pengeluaran per kapita (PPK) yang signifikan terjadi pasca kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mampu menurunkan disparitas harga barang melalui kebijakan BBM satu harga. Kebijakan tersebut mendapat apresiasi dan diakui oleh Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai salah satu langkah Presiden Jokowi yang sangat berdampak kepada masyarakat. Turunnya harga BBM di pedalaman membuat harga barang menurun sehingga daya beli masyarakat meningkat. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Najmulmunir (2008) yang menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang menentukan rendahnya daya beli masyarakat di Jawa Barat adalah kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM.

Selain itu pula, komitmen pemerintah pusat mempercepat sejumlah pembangunan infrastruktur di Papua turut mendorong laju pertumbuhan pengeluaran per kapita. Hal itu didukung dengan penelitian Ezkiriando dan Findi A (2013) juga menyimpulkan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah untuk penyediaan infrastruktur terbukti secara signifikan mempengaruhi tingkat PDRB per kapita di suatu wilayah. Lebih lanjut, Lumbantoruan dan Hidayat (2014) menyatakan tingkat pendapatan atau PDB per-kapita yang tinggi cenderung meningkatkan belanja penduduk untuk peningkatan pembangunan manusia di bidang kesehatan dan pendidikan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018 (diolah)

**Gambar 3**  
**Pertumbuhan IPM Provinsi Papua Tahun 2011-2017**

## PENUTUP

Berdasarkan ulasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata pertumbuhan IPM Provinsi Papua tahun 2015-2017 merupakan yang tertinggi dibandingkan capaian provinsi lainnya di Indonesia, yaitu sebesar 1,36 persen per tahun. Bertolak dari hal tersebut dan dengan asumsi bahwa situasi pembangunan manusia yang sama selama tiga tahun terakhir, maka dalam waktu 20 tahun mendatang capaian IPM Provinsi Papua akan mampu menyamai capaian IPM dari 12 provinsi lainnya di Indonesia. Provinsi tersebut antara lain: Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Maluku, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Riau, Banten, Sulawesi Barat dan Lampung.

Selain itu dapat pula disimpulkan bahwa fluktuasi pertumbuhan IPM Provinsi Papua cenderung searah dengan tren pertumbuhan indikator PPK dan HLS dan cenderung berbanding terbalik dengan tren pertumbuhan indikator AHH dan RLS. Sebagaimana penelitian ini hanya menggunakan metode statistik deskriptif yang sederhana dan dengan asumsi pembangunan manusia yang sama, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan analisis multivariate dan dengan memperhitungkan asumsi pembangunan manusia yang dinamis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2018). *Indeks Pembangunan Manusia 2017*. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2018). *Laporan Perekonomian Daerah Provinsi Papua 2018*. Jayapura. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.
- Bappenas. 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Buku I*. Jakarta: Bappenas.

- \_\_\_\_\_. 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Buku II. Jakarta: Bappenas
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Astri, M. & Nikensari, S.I & Kuncara, H. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Bisnis*. 1(1), 77-102.
- Putra S, Z. & Palisuri, P. & Chahyono. (2017). Analisis Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Luwu. *Jurnal Riset Edisi XIV*. 3(3). 50-66.
- Pramono, Y.A. & Soesilowati, E. (2016). Determinan Kualitas Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*. 5(3). 269-277.
- Baeti, N. (2013). Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*. 2(3). 85-98.
- Najmulmunir, N. (2008). Dampak Kebijakan Harga Minyak Terhadap Daya Beli Masyarakat. *Jurnal FISIP: MADANI*. 8(2). 23-32.
- Ezkirianto, R. & Findi A, M. (2013). Analisis Keterkaitan Antara Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB Per Kapita di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*. 2(1). 14-29.
- Lumbantoruan, P.E. & Hidayat, P. (2014). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-Provinsi di Indonesia (Metode Kointegrasi). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. 2(2). 14-27.
- Astuti, M. (2018). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia, Indonesia.
- Pasific Pos. 2017. Gubernur: Jokowi Sukses Bangun Papua. Diambil dari <https://www.pasificpos.com/item/20177-gubernur-jokowi-sukses-bangun-papua>. Diakses tanggal 22 November 2018
- Presiden RI. 2016. Membangun Papua, Membangun Impian Bersama. Diambil dari <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/membangun-papua-membangun-impian-bersama.html>. Diakses tanggal 22 November 2018
- Presiden RI. 2015. Membangun Papua Melalui Pendidikan. Diambil dari <http://presidenri.go.id/berita-aktual/membangun-papua-melalui-pendidikan.html>. Diakses tanggal 22 November 2018